

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
PENGANTAR: PERLU PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	ix
SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	xii
SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
RANGKUMAN	1
BAB 1 PENDAHULUAN.....	9
BAB 2 PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SERTA PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	12
A. Pembangunan Kesehatan.....	12
B. Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	28
BAB 3 KEBIJAKAN PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	36
A. Dasar Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat.....	36
B. Tujuan dan Sasaran	37
C. Strategi	40
BAB 4 CARA PENYELENGGARAAN PENGUATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.....	43
A. Analisis, Pengendalian, dan Penilaian.....	43
B. Pengembangan Kebijakan	44
C. Pelaksanaan dan Dukungan.....	46

BAB 5	CARA PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....	53
BAB 6	DUKUNGAN PENYELENGGARAAN	63
	A. Proses Penyelenggaraan.....	63
	B. Tata Penyelenggaraan.....	81
	C. Penyelenggara	85
	D. Pembiayaan Kesehatan.....	87
	E. Sistem Informasi Kesehatan.....	90
	F. Pelaksanaan Paradigma Sehat.....	93
	G. Pembinaan dan Pengawasan.....	95
	H. Kerja Sama Internasional	96
BAB 7	PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN.....	97
	A. Tingkat Nasional	98
	B. Tingkat Daerah.....	98
BAB 8	PENUTUP	99
LAMPIRAN 1		101
LAMPIRAN 2		102
LAMPIRAN 3		105
Bahan 1	Arah Pembangunan Kesehatan yang Berkaitan dengan Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat	107
Bahan 2	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sesuai Dengan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	177
Bahan 3	Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	185
Bahan 4	Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Indonesia oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat, dan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.....	211
Bahan 5	Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang	

Kesehatan Khususnya Mengenai Penguatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Melalui Pengembangan Inovasi Lokal: Pembelajaran Provinsi Sulawesi Tenggara.....	259
Bahan 6 Kementerian Kesehatan, Usulan Formulasi Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Sebagai Muatan PP tentang Pemberdayaan Masyarakat, 2014.....	285
Bahan 7 Pancasila dan Pengaruhnya pada Filsafat atau Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan.....	291
Bahan 8 Perkembangan, Hambatan, dan Prospek Pelaksanaan Pendekatan Proses dalam Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Berbagai Negara, di Indonesia, dan Organisasi Kesehatan Sedunia	323
BEBERAPA PENGERTIAN	346
KEPUSTAKAAN	354
UCAPAN TERIMA KASIH	370
BIODATA.....	375

Pemikiran dasar pembangunan kesehatan terutama tentang dasar-dasar pembangunan kesehatan sangat penting untuk pengembangan model pembangunan kesehatan di Indonesia dewasa ini dan di masa depan. Dengan mengacu pada perkembangan pembangunan kesehatan di dunia, dipandang penting pula untuk memperhatikan kesepakatan kebijakan pembangunan kesehatan secara global dalam abad 21. Kebijakan ini tertuang didalam *Resolusi Organisasi Kesehatan Sedunia, WHA 51.7 tanggal 16 Mei 1998 tentang "Health for All Policy in the Twenty First Century"*. Dalam resolusi tersebut ditetapkan *World Health Declaration* yang disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Sedunia.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa tantangan penguatan upaya kesehatan masyarakat terutama meliputi masih terbatasnya pemerataan pembangunan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan yang masih terbatas mutunya, upaya kesehatan masyarakat yang masih kurang berfungsi, kemampuan pengelolaan atau manajemen pembangunan kesehatan yang belum kuat, dan peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang belum optimal. Sementara itu, tantangan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu belum optimalnya pergerakan masyarakat, pengorganisasian masyarakat